

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI) PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
SUB UNIT KERJA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI) PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YAYAT RAHADYAT
2. Jabatan : PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 236200

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 207.558.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m²/180 m² di TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 207.558.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 109.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, YAMAHA X RIDE Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000

D. SURAT BERTAHAP Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 167.814.309

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 494.872.309

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 494.872.309

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal 25 Juli 2019.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.